

LAPORAN PELAKSANAAN
PENERAPAN TATA KELOLA (GCG)
PT. BPR SYARIAH METRO MADANI
TAHUN 2025



BANK METRO MADANI
PT. BPR Syariah Metro Madani

Jl.AH Nasution No.74 Yosorejo Kota Metro lampung
TELEPON: 072544365



**LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENANDATANGANAN
LAPORAN TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA**

Dengan ini kami menyatakan bahwa:


Laporan Transparansi Penerapan Tata Kelola
PT BPR Syariah Metro Madani Tahun 2025

Telah disusun sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai berikut:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
2. Surat Edaran OJK (SEOJK) No. 15/SEOJK.03/2025 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat Syariah.


Demikian Laporan ini dibuat yang menjadi gambaran umum penerapan Tata Kelola PT BPR Syariah Metro Madani selama tahun 2025. Penerapan Tata Kelola BPR Syariah yang baik diharapkan dapat mendorong kinerja perusahaan, melindungi kepentingan pemangku kepentingan (*stakeholders*) dan meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku umum di industri Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPR Syariah).

Metro, 15 April 2026 
PT BPR Syariah Metro Madani
Menyetujui, 


Indah Purnomowati
Komisaris Utama



PT. BPR SYARIAH
METRO MADANI
KP. METRO


Kamino
Direktur Utama

BAB I

PENJELASAN UMUM

Nomor Laporan Hasil Pengawasan DPS Semester 1: 04/BPRS-MM/DPS/VII/2025
Tanggal Laporan Hasil Pengawasan DPS Semester 1: 22 Juli 2025
Nomor Laporan Hasil Pengawasan DPS Semester 2: 09/BPRS-MM/DPS/XII/25
Tanggal Laporan Hasil Pengawasan DPS Semester 2: 31 Desember 2025

PT BPR Syariah Metro Madani telah melakukan pelaksanaan tata kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut berdampak kurang signifikan terhadap kegiatan operasional dan PT BPR Syariah Metro Madani akan senantiasa untuk memperbaiki dan terus meningkatkan kinerja dengan baik sehingga penerapan tata kelola di tahun yang akan datang menjadi lebih baik



BAB II
TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA
PT. BPR SYARIAH METRO MADANI

A. Ringkasan Hasil Penilaian (*Self Assesment*) atas Penerapan Tata Kelola

Alamat	:	Jalan AH Nasution No.74 Yosorejo Kec. Metro Timur Kota Metro Lampung
Nomor Telepon	:	0725-44365
Penjelasan Umum	:	<p>PT. BPR Syariah Metro Madani telah melakukan pelaksanaan tata kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut berdampak kurang signifikan terhadap kegiatan operasional dan PT.BPR Syariah Metro Madani akan senantiasa untuk memperbaiki dan terus meningkatkan kinerja dengan baik sehingga penerapan tata kelola di semester yang akan datang menjadi lebih baik.</p> <p>Laporan Transparansi Penerapan Tata Kelola PT. BPR Syariah Metro Madani disusun untuk memenuhi kewajiban atas POJK No. 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola BPR dan BPR Syariah dan SEOJK No. 15/SEOJK.03/2025 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat Syariah.</p>
Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (<i>Self Assesment</i>) Tata Kelola	:	2 (Baik)
Penjelasan Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (<i>Self Assesment</i>) Tata Kelola	:	Tata Kelola pada PT BPR Syariah Metro Madani mendapatkan peringkat 2 (dua). Direksi, Dewan Komisaris, DPS dan seluruh karyawan akan meningkatkan kinerjanya sehingga dapat melaksanakan fungsinya dengan baik, pendidikan dan pelatihan yang berkesinambungan akan diperoleh seluruh karyawan maupun pengurus menjadikan kualitas pemahaman akan tugas dan tanggung jawab menjadi meningkat. Penerapan tata kelola telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dari POJK serta prinsip syariah yang berlaku.

B. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola

1. Pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan Wewenang Direksi

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi	
1	Nama	: Kamino
	NIK	: 1807240507800007
	Jabatan	: Direktur Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab :	
	Dalam menjalankan bisnis perusahaan, Direktur Utama memiliki tanggung jawab meliputi :	

	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bertanggung jawab atas penyaluran dana kepada masyarakat. 2. Menetapkan memutuskan, dan menyetujui, serta memerintah pembayaran dalam rangka realisasi pembiayaan yang diberikan kepada calon nasabah PT. BPR Syariah Metro Madani. 3. Menetapkan cara-cara penagihan kembali atas pembiayaan yang telah diberikan kepada nasabah menunggak secara efektif dan efisien. 4. Melaporkan secara berkala kepada Dewan Komisaris disertai dengan langkah- langkah perbaikan yang sedang dan/atau dilakukan mengenai : <ol style="list-style-type: none"> a. Perkembangan jumlah dana yang dapat dihimpun dari tabungan dan deposito berjangka, serta sumber-sumber dana lainnya. b. Perkembangan dan kualitas pembiayaan yang diberikan kepada pihak terkait dan nasabah tertentu. c. Memantau pelaksanaan rencana bisnis dibidang produk penghimpunan dana dan produk penyaluran dana sebagaimana tertuang dalam rencana bisnis bank yang disampaikan ke OJK. 5. Menetapkan rencana pengembangan dan pengadaan Teknologi Informasi PT. BPR Syariah Metro Madani. 6. Menetapkan kebijakan dan prosedur terkait penyelenggaraan Teknologi Informasi yang memadai dan mengomunikasikannya secara efektif, baik pada satuan kerja penyelenggara maupun pengguna Teknologi Informasi. 7. Memantau kecukupan kinerja penyelenggaraan Teknologi Informasi dan upaya peningkatannya. 8. Memastikan bahwa: <ol style="list-style-type: none"> a. Teknologi Informasi yang digunakan mendukung perkembangan usaha, pencapaian tujuan bisnis dan kelangsungan pelayanan terhadap nasabah. b. Terdapat kegiatan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan penyelenggaraan dan penggunaan Teknologi Informasi. c. Tersedianya sistem pengelolaan pengamanan informasi (information security management system) yang efektif dan dikomunikasikan kepada satuan kerja penyelenggara dan pengguna Teknologi Informasi. d. Kebijakan dan prosedur penyelenggaraan Teknologi Informasi diterapkan secara efektif. 	
2	Nama	: Rita Mailinda
	NIK	: 1871016705790005
	Jabatan	: Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan
	Tugas dan Tanggung Jawab :	
	<p>Dalam menjalankan fungsi kepatuhan, Direktur Kepatuhan memiliki tanggung jawab meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menetapkan langkah- langkah yang diperlukan untuk memastikan PT. BPR Syariah Metro Madani yang telah memenuhi seluruh peraturan OJK dan peraturan lainnya dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati- hatian termasuk memberikan pendapat yang berbeda (disseting opinion) apabila terdapat kebijakan dan/ atau keputusan yang menyimpang dari peraturan. 2. Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha PT. BPR Syariah Metro Madani tidak meyimpang dari peraturan perundang-undangan. 3. Memantau dan menjaga kepatuhan PT. BPR Syariah Metro Madani terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh PT. BPR Syariah Metro Madani. 4. Bertanggung jawab atas penghimpunan dana dari masyarakat. 	

5. Memastikan terlaksananya sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada unit kerja terkait mengenai peraturan OJK terkini dan peraturan perundang-undangan lain relevan.
6. Melaporkan kepada anggota Direksi lainnya dan Dewan Komisaris terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh pegawai PT. BPR Syariah Metro Madani.
7. Direksi Wajib menindaklanjuti temuan audit dan/ atau rekomendasi dari satuan kerja audit intern Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern BPRS, auditor ekstern.
8. Hasil pengawasan Dewan Komisaris, DPS, Otorisas Jasa Keuangan, dan/ atau otoritas lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Melaporkan kepada Dewan Komisaris terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh Direksi.
10. Tidak diperkenankan untuk membawahi fungsi bisnis dan Audit Intern.
11. Memastikan terlaksananya program AntiPencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (selanjutnya disingkat APU dan PPT) seluruh operasional Bank, dengan berpedoman pada peraturan dan perundang-undangan.

Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Dewan Komisaris

1. Sepanjang tahun 2025, secara umum Bank dapat merealisasikan rencana bisnis yang telah direncanakan. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan dan langkah strategis yang di terapkan Direksi telah membawa PT BPR Syariah Metro Madani kearah yang lebih baik. Hal tersebut tercermin dari indikator kinerja Keuangan yang telah terealisasi dari RBB 2025 dan peningkatan dari tahun sebelumnya dengan tetap menjaga tingkat Kesehatan Bank. Terkait dengan belum terealisasinya rencana bisnis pada penghimpunan DPK dan Pembiayaan maka diupayakan dapat direalisasikan pada Tahun 2026.
2. Dalam rangka pengawasan Rencana Bisnis Bank (RBB) Dewan Komisaris meminta laporan kinerja keuangan rutin secara bulanan kepada Direksi dan melakukan rapat koordinasi rutin setiap bulan sebagai bentuk pengawasan kinerja perusahaan dan pengawasan realisasi RBB sebagai evaluasi kinerja secara menyeluruh untuk seluruh jaringan kantor dan memberikan saran kebijakkan strategis yang akan ditempuh dalam merealisasikan rencana bisnis Bank.
3. Melakukan pengawasan realisasi rencana bisnis bank dengan meminta laporan bulanan, setiap bulan dan melakukan rapat koordinasi secara rutin setiap bulan untuk melakukan evaluasi kinerja sebagai dasar pengambilan kebijakan untuk tercapainya rencana bisnis bank dan akan terus memberikan saran perbaikan terkait strategi bisnis kepada Direksi pada saat rapat evaluasi bulanan, meminta laporan komponen RBB yang belum tercapai dengan rencana tindak lanjut dari Direksi.
4. Prestasi kinerja keuangan Tahun 2025 yang sudah berjalan dengan baik agar tetap dapat dipertahankan dan ditingkatkan pada Tahun 2026.

2. Pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan Wewenang Komisaris

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komisaris	
1	Nama	: Indah Purnomowati
	NIK	: 1802106008750001
	Jabatan	: Komisaris Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab :	
<p>Tugas dan Tanggung Jawab antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dewan Komisaris wajib memastikan penerapan Tata Kelola yang baik sehingga terselenggara dalam setiap kegiatan usaha BPR Syariah Metro Madani pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. 2. Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi. 3. Dalam melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi sebagaimana dimaksud, Dewan Komisaris Wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR Syariah Metro Madani. 4. Dalam melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi sebagaimana dimaksud, Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan BPR Syariah Metro Madani, terkecuali terkait dengan: Pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris merupakan bagian dari tugas pengawasan Dewan Komisaris sehingga tidak meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan kepengurusan BPR Syariah Metro Madani. 5. Dewan Komisaris memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan Teknologi informasi. 6. Dewan Komisaris memiliki wewenang dan tanggung jawab terkait dengan pengawasan penerapan manajemen risiko yang mencakup. 7. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan/ atau rekomendasi dari satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern BPRS, auditor ekstrn, hasil pengawasan Dewan Komisaris, DPS, Otoritas Jasa Keuangan, dan / atau otoritas lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 8. Dewan Komisaris wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan : <ol style="list-style-type: none"> a. Pelanggaran ketentuan peraturan perundang- undangan dibidang keuangan dan perbankan; dan/atau b. Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPRS, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak ditemukannya pelanggaran dan/ atau keadaan atau perkiraan keadaan. 		
2	Nama	: Subroto
	NIK	: 1872041902640002
	Jabatan	: Komisaris
	Tugas dan Tanggung Jawab :	

Handwritten signature and initials in blue ink.

1. Dewan Komisaris wajib memastikan penerapan Tata Kelola yang baik sehingga terselenggara dalam setiap kegiatan usaha BPR Syariah Metro Madani pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
2. Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi.
3. Dalam melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi sebagaimana dimaksud, Dewan Komisaris Wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR Syariah Metro Madani.
4. Dalam melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi sebagaimana dimaksud, Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan BPR Syariah Metro Madani, terkecuali terkait dengan: Pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris merupakan bagian dari tugas pengawasan Dewan Komisaris sehingga tidak meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan kepengurusan BPR Syariah Metro Madani.
5. Dewan Komisaris memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan Teknologi informasi.
6. Dewan Komisaris memiliki wewenang dan tanggung jawab terkait dengan pengawasan penerapan manajemen risiko yang mencakup.
7. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan/ atau rekomendasi dari satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern BPR Syariah Metro Madani, auditor ekstrn, hasil pengawasan Dewan Komisaris, DPS, Otoritas Jasa Keuangan, dan / atau otoritas lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Dewan Komisaris wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan :
 - a. Pelanggaran ketentuan peraturan perundang- undangan dibidang keuangan dan perbankan; dan/atau
 - b. Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPRS, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak ditemukannya pelanggaran dan/ atau keadaan atau perkiraan keadaan.

Rekomendasi Kepada Direksi

Komisaris telah memberikan saran kepada Direksi untuk melakukan penyempurnaan strategi Bisnis antara lain:

1. Melakukan penyempurnaan ketentuan pembiayaan secara efektif dan mengembangkan struktur organisasi pembiayaan dan pendanaan.
2. Menambah tenaga khusus Marketing pendanaan.
3. Terkait dengan belum terealisasinya rencana bisnis pada penghimpunan DPK dan Pembiayaan maka diupayakan dapat direalisasikan pada Tahun 2026.

3. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Pengawas Syariah

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Pengawas Syariah		
1	Nama	:	Sujino
	NIK	:	1872011605770005
	Jabatan	:	Ketua Dewan Pengawas Syariah

	Tugas dan Tanggung Jawab :	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan BPR Syariah agar sesuai dengan Prinsip Syariah. 2. Mengevaluasi kebijakan dan standar prosedur operasinal BPR Syariah agar sesuai dengan Prinsip Syariah. 3. Mengawasi proses pengembangan produk baru BPR Syariah agar sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia. 4. Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia untuk produk baru BPRS yang belum ada fatwanya. 5. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa BPR Syariah. 6. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja di BPR Syariah untuk pelaksanaan tugasnya. 7. DPS wajib menyampaikan laporan hasil pengawasan DPS setiap semester kepada OJK 	
2	Nama	: Abdurahhim Hamdi
	NIK	: 1801042901870009
	Jabatan	: Anggota Dewan Pengawas Syariah
	Tugas dan Tanggung Jawab :	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan BPR Syariah agar sesuai dengan Prinsip Syariah. 2. Mengevaluasi kebijakan dan standar prosedur operasinal BPR Syariah agar sesuai dengan Prinsip Syariah. 3. Mengawasi proses pengembangan produk baru BPR Syariah agar sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia. 4. Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia untuk produk baru BPRS yang belum ada fatwanya. 5. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa BPR Syariah. 6. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja di BPR Syariah untuk pelaksanaan tugasnya. 7. DPS wajib menyampaikan laporan hasil pengawasan DPS setiap semester kepada OJK 	
	Rekomendasi Penerapan Prinsip Syariah Kepada Direksi	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan penghimpunan dana dalam produk simpanan perlu dijalankan sesuai dengan SOP agar terpenuhi prinsip syariah. 2. Pemenuhan syarat dan rukun dalam akad pembiayaan masih terdapat hal-hal yang belum sesuai dengan prinsip syariah. 3. Prinsip syariah dalam akad penghimpunan dana dan pembiayaan menjadi tanggung jawan bersama untuk dijaga sesuai dengan Fatwa DSN MUI. 	

Handwritten signature and blue arrow pointing to the right.

Handwritten signature.

4. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite

a. Tugas, Tanggung Jawab, Program Kerja, dan Realisasi Program Kerja Komite

No	Komite	Tugas dan Tanggung Jawab	Program Kerja	Realisasi	Jumlah Rapat
1	Komite Audit	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
2	Komite Pemantau Risiko	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
3	Komite Remunerasi dan Nominasi	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi

No	Nama Anggota Komite	Keahlian	Komite			Pihak Independen
			Audit	Pemantau Risiko	Remunerasi dan Nominasi	
1.	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

C. Kepemilikan Saham Anggota Direksi

No	Nama Anggota Direksi	Kepemilikan Saham			
		BPRS yang Bersangkutan		Perusahaan Lain	
		Nominal	Presentase Kepemilikan (%)	Nama Perusahaan	Presentase Kepemilikan (%)
1.	Kamino	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
2.	Rita Mailinda	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

D. Hubungan Keuangan dan atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris, dan atau Pemegang Saham BPRS yang Bersangkutan

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Kamino	Nihil	Nihil	Nihil
2.	Rita Mailinda	Nihil	Nihil	Nihil

2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Kamino	Nihil	Nihil	Nihil
2.	Rita Mailinda	Nihil	Nihil	Nihil

E. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPRS yang Bersangkutan dan Perusahaan Lain

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Kepemilikan Saham			
		BPRS yang Bersangkutan		Perusahaan Lain	
		Nominal	Presentase Kepemilikan (%)	Nama Perusahaan	Presentase Kepemilikan (%)
1.	Indah Purnomowati	984.000.000	7,29	Nihil	Nihil
2.	Subroto	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

F. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris Lain, dan/atau Pemegang Saham BPRS yang Bersangkutan

1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Indah Purnomowati	Nihil	Nihil	Nihil
2.	Subroto	Nihil	Nihil	Nihil

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Indah Purnomowati	Nihil	Nihil	Bambang – Adik Kandung
2.	Subroto	Nihil	Nihil	Nihil

G. Rangkap Jabatan Anggota Dewan Komisaris pada Bank Perkreditan Rakyat, BPRS Lain, dan/atau Lembaga atau Perusahaan Lain*)

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nama BPRS Lain/ BPR/Lembaga/Perusahaan***)	Jabatan
1	Indah Purnomowati	KSPPS BMT Surya Abadi Riyanto	Manager
2	Subroto	Nihil	Nihil

H. Rangkap Jabatan Anggota DPS sebagai Anggota DPS pada Lembaga Keuangan Syariah Lain*)

No	Nama Anggota Dewan Pengawas Syariah	Nama BPRS Lain/ BPR/Lembaga/Perusahaan***)	Jabatan
1	Sujino	Ponpes Muhammadiyah At Tanwir	Direktur
2	Abdurrahim Hamdi	RSU Muhammadiyah Metro	Wakil Direktur

I. Paket atau Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS yang Ditetapkan Berdasarkan Keputusan RUPS

No	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris		DPS	
		Jumlah Orang	Jumlah (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah (Rp)
A	Remunerasi						
1.	Gaji Pokok	2	134.550.000,00	2	68.850.000,00	2	53.820.000,00
2.	Tunjangan	2	409.572.333,00	2	105.852.117	2	71.457.246,00
3.	Tantiem	2	478.800.891,00	2	91.948.598	2	101.650.511
4.	Bonus						
5.	Kompensasi Berbasis Saham						
6.	Remunerasi lainnya*	2	36.755.892	2	0	2	0
	Total Remunerasi		1.059.678.116,00		266.650.715,00		226.927.757,00
B	Fasilitas Lain						
1.	Perumahan						
2.	Transportasi						
3.	Kesehatan	2	14.400.000,00	2	0	2	0
4.	Fasilitas lain-lainnya						
	Total fasilitas lain		14.400.000,00		0		0
C	Total Remunerasi dan Fasilitas Lain		1.074.078.116,00		266.650.715,00		226.927.757,00

J. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Deskripsi	Rasio
Rasio gaji anggota Direksi tertinggi terhadap gaji anggota Direksi terendah	1,24 : 1
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris tertinggi terhadap gaji anggota Dewan Komisaris terendah	1,87 : 1
Rasio gaji anggota DPS tertinggi terhadap gaji anggota DPS terendah	1,25 : 1
Rasio gaji pegawai tertinggi terhadap gaji pegawai terendah	3,17 : 1
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris tertinggi terhadap gaji anggota Direksi tertinggi	0,34 : 1
Rasio gaji anggota Direksi tertinggi terhadap gaji pegawai tertinggi	2.98 : 1

K. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

1. Penyelenggaraan Rapat Dalam 1 (satu) Tahun

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Agenda Rapat
1.	14 Januari 2025	1	Evaluasi Realisasi RBB Bulan Desember 2024, Evaluasi Kinerja Kantor Cabang Bulan Desember 2024.
2.	11 Februari 2025	1	Evaluasi Tindak Lanjut Rapat Bulan Lalu, Evaluasi Realisasi RBB Bulan Januari 2025, Evaluasi Kinerja Kantor Cabang Bulan Januari 2025.
3.	11 Maret 2025	1	Evaluasi Tindak Lanjut Rapat Bulan Lalu, Evaluasi Realisasi RBB Bulan Februari 2025, Evaluasi Kinerja Kantor Cabang Bulan Februari 2025.
4.	29 April 2025	2	Evaluasi Tindak Lanjut Rapat Bulan Lalu, Evaluasi Kinerja Bulan Maret 2025, Evaluasi Kinerja Kantor Cabang Bulan Maret 2025
5	18 Mei 2025	2	Evaluasi tindak lanjut rapat bulan lalu, evaluasi realisasi RBB bulan April 2025, dan evaluasi kinerja kantor cabang bulan April 2025.
6	18 Juni 2025	2	Evaluasi tindak lanjut rapat bulan lalu, evaluasi realisasi RBB bulan Mei 2025, dan evaluasi kinerja kantor cabang bulan Mei 2025.
7	20 Juli 2025	2	Evaluasi tindak lanjut rapat bulan lalu, evaluasi realisasi RBB bulan Juni 2025, dan evaluasi kinerja kantor cabang bulan Juni 2025.
8	15 September 2025	2	Evaluasi tindak lanjut rapat bulan lalu, evaluasi realisasi RBB bulan Agustus 2025, dan evaluasi kinerja kantor cabang bulan Agustus 2025.
9	21 Oktober 2025	2	Evaluasi tindak lanjut rapat bulan lalu, evaluasi realisasi RBB bulan Agustus 2025, dan evaluasi kinerja kantor cabang bulan Agustus 2025.
10	18 November 2025	2	Evaluasi tindak lanjut rapat bulan lalu, evaluasi realisasi RBB bulan Oktober 2025, dan evaluasi kinerja kantor cabang bulan Oktober 2025.

2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (%)
		Fisik	Telekonferensi	
1	Indah Purnomowati	10	0	100%
2	Subroto	7	0	100%

L. Frekuensi Rapat Dewan Pengawas Syariah

1. Penyelenggaraan Rapat Dalam 1 (satu) Tahun

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Agenda Rapat
1.	07 Januari 2025	2	Pembahasan Draf Laporan pemeriksaan DPS Semester 1 Januari-Juni 2025. Pembahasan Opini syariah tentang penutupan tabungan.
2.	12 Februari 2025	2	Laporan kinerja keuangan Januari 2025, dan manajemen risiko.
3.	12 Maret 2025	2	Tanggapan laporan kinerja bulanan dan peningkatan pemahaman syariah bagi karyawan.
4.	29 April 2025	2	Pembahasan draf laporan pemeriksaan DPS semester 1 Januari-Juni 2025. Pembahasan permasalahan likuiditas hari raya.
5.	11 Juni 2025	2	Permintaan opini penutupan tabungan pendidikan anak SMK.
6.	20 Agustus 2025	2	Pembahasan tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Direksi.
7.	20 September 2025	2	Review SOP tentang Biaya Administrasi Pembiayaan, Materi Laporan Ijtima' Tsanawi.
8.	25 Desember 2025	2	Pembahasan Temuan Pemeriksaan DPS dan Usulan Perbaikan.
9.	31 Desember 2025	2	Pembahasan fix Temuan Pemeriksaan SMT 2 tahun 2025 dan usulan perbaikan

2. Kehadiran Anggota Dewan Pengawas Syariah

No	Nama Anggota Dewan Pengawas Syariah	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (%)
		Fisik	Telekonferensi	
1	Sujino	9	0	100%
2	Abdurrahim Hamdi	9	0	100%

M. Jumlah Penyimpangan Intern (Internal Fraud)

Jumlah Penyimpangan Internal*) (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus yang Dilakukan oleh:							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Telah diselesaikan	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Dalam proses penyelesaian	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Belum diupayakan penyelesaiannya	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

Telah ditindaklanjuti Proses Hukum	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
------------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

N. Jumlah Permasalahan Hukum dan Upaya Penyelesaian oleh BPRS

Permasalahan Hukum	Jumlah (satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	5	0
Total	5	0

O. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

No	Pihak Yang Memiliki Benturan Kepentingan		Pengambil Keputusan		Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (jutaan)	Keterangan
	Nama	Jabatan	Nama	Jabatan			
1	-	-	-	-	-	-	-

P. Penyaluran Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

No	Tanggal Penyaluran Dana	Jenis Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Pihak Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1.	6 Februari 2025	Sosial	Kajian Songsong Ramadhan, Launching SD HAMKA Metro Timur, Jalan Sehat dan Cek Kesehatan Gratis	Pimpinan Cabang Muhammadiyah Metro Timur	Rp.2.000.000,00
2.	7 Februari 2025	Sosial	Bantuan Dana Pembelian Kendaraan Bermotor (Operasional)	SMP Muhammadiyah Ahmad Dahlan	Rp.10.000.000,00
3.	14 Februari 2025	Sosial	Kegiatan SICERAH (Semarak Islam Sang Pencerah) ke – 5 Tingkat TK dan PAUD se-Lampung	SD Muhammadiyah Sang Pencerah	Rp.1.000.000,00
4.	20 Februari 2025	Sosial	Bantuan Dana Operasional	Yayasang Rumah Singgah Mentari	Rp.1.000.000,0
5.	4 Maret 2025	Sosial	Bingkisan Ramadhan Santunan Anak Yatim	Badan Kontak Majelis Taklim Kota Metro	Rp.4.000.000,00
6.	4 Maret 2025	Sosial	Pemasangan Plafon PVC Mushola Az-Zahra	PCM Tejoagung	Rp.1.000.000,00
7.	12 Maret 2025	Sosial	Hari BPR Syariah Indonesia dan Santunan Ramadhan	HIMBARSI DPW Lampung	Rp.2.000.000,00

Handwritten signature and initials in blue ink.

			ke Panti Asuhan		
8.	13 Maret 2025	Sosial	Berbagi Takjil Gratis Bagi Masyarakat	HIMBARSİ DPW Lampung	Rp.2.000.000,00
9.	14 Maret 2025	Sosial	Berbagi Takjil Gratis Bagi Masyarakat	HIMBARSİ DPW Lampung	Rp.1.000.000,00
10.	19 Maret 2025	Sosial	Pemberian Baju Koko+Sarung untuk Imam dan Bilal Musholla As-Salam	Pengurus Musholla As Salam	Rp.500.000,00
11.	21 Maret 2025	Sosial	Jadwal Takjil Ramadhan	Musholla At-Taubah dan Masjid Al Mujahidin	Rp.700.000,00
12	24 Maret 2025	Sosial	Donasi Peduli Kemanusiaan Untuk Palestina	DPP HIMBARSİ	Rp.3.000.000,00
13	11 April 2025	Sosial	Permohonan Bantuan Dana atas Kehilangan Kendaraan Bermotor (Sdri. Mega Karlina) KC TBB	Mega Karlina CS KC TBB	Rp.2.000.000,00
14.	2 Mei 2025	Sosial	Kegiatan Sunat Massal dan Bakti Sosial	Karang Taruna Kelurahan Hadimulyo Timur	Rp.500.000,00
15.	8 Mei 2025	Sosial	Kegiatan Graduation and Appreciation for Hafidz Al-Qur'an	Ponpes Muhammadiyah At-Tanwir	Rp.5.000.000,00
16.	20 Mei 2025	Sosial	Partisipasi Program Qurban 1446 H	RSU Muhammadiyah Metro	Rp.3.300.000,00
17.	4 Juni 2025	Sosial	Pembangunan Musholla Baitul Hikmah	SMK N 1 Trimurjo	Rp.300.000,00
18.	31 Juli 2025	Sosial	Jum'at Berkah Metro Madani KP Metro (Bagi Sarapan Gratis)	Masyarakat Sekitar dan Nasabah	Rp.1.600.000,00
19	7 Agustus 2025	Sosial	Pembangunan Masjid	Masjid Baiturrahim Simbarwaringin	Rp.500.000,00
20.	2 September 2025	Sosial	Acara Maulid Creative Fest 2025	Komunitas Ayo Cinta Masjid Kota Metro	Rp.8.000.000,00
21.	23 September 2025	Sosial	Santunan kepada Anak Yatim	PT. Penjamin Kredit Daerah (JAMKRIDA)	Rp.500.000,00
23.	10 Oktober 2025	Sosial	Santunan atas Musibah Kebakaran Rumah Nasabah (Pembelian Motor Second)	Sutanto	Rp.10.000.000,00

Handwritten signature and initials at the bottom right of the page.

24.	23 Oktober 2025	Sosial	Bantuan Pembangunan Kembali TK Khodijah Pasca Musibah Kebakaran	TK Khodijah	Rp.2.000.000,00
25.	24 Oktober 2025	Sosial	Milad Muhammadiyah ke – 113	PCM Bantul	Rp.1.000.000,00
26.	5 November 2025	Sosial	Pembangunan Masjid Al-Jihad	Masjid Al-Jihad Tempuran 12 B	Rp.1.000.000,00
27.	12 November 2025	Sosial	Beasiswa Wisudawan Hafiz Qur'an Terbaik I dan II	Univ. Muhammadiyah Metro	Rp.10.000.000,00
28.	2 Desember 2025	Sosial	Peduli Sumatera (Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat)	DPP HIMBARS	Rp.5.000.000,00
29.	3 Desember 2025	Sosial	Semarak Milad ke-18 RSU Muhammadiyah Metro Tahun 2026	RSU Muhammadiyah Metro	Rp.5.000.000,00
30.	29 Desember 2025	Sosial	Peduli Sumatera (Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat)	LAZISMU Kota Metro	Rp.6.000.000,00